

PERAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM MENINGKATKAN MASYARAKAT “SUATU STUDI PENDIDIKAN NON- FORMAL” DI KABUPATEN LANNY JAYA PROVINSI PAPUA

Daibenus Wenda¹
Ismail Sumampow²
Jones Tompodung³

Abstrak

Pendidikan di tanah Papua masih dalam kondisi yang memprihatinkan, oleh karena itu diperlukan peran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya yang ada di Kabupaten Lanny Jaya. Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Pendidikan dan kebudayaan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan masyarakat Kabupaten Lanny Jaya, dan sekaligus untuk mengetahui kendala atau hambatan (kelemahan) yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan program-program Peningkatan Kualitas Pendidikan masyarakat Kabupaten Lanny Jaya. Adapun indikator yang menjadi fokus penelitian Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Lanny Jaya adalah peningkatan Sumber Daya Manusia Guru, Penyediaan Sarana dan Prasarana, dan Kurikulum. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Metode Observasi, Dokumentasi dan Wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan kebudayaan telah melaksanakan perannya melalui program-program peningkatan kualitas tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan sarana pendidikan, serta penyampaian dan pengembangan kurikulum.

Kata kunci : Peran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Masyarakat.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Daerah Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, terutama di kawasan Indonesia bagian Timur, termasuk Papua, dan Papua Bagian Barat masih jauh tertinggal dibandingkan masyarakat yang ada di bagian Indonesia Bagian Barat dan Tengah. Itulah sebabnya pada program-program Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah tertinggal, maka salah satu bidang yang diprioritaskan adalah tenaga pengajar atau guru. Sebab kebanyakan masyarakat yang berdiam di kabupaten lanny jaya Propinsi Papua ini rata - rata masih rendah, sehingga kurang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan masyarakat di daerah ini. Oleh sebabnya, pemerintah harus mendorong dalam peran dinas pendidikan dan kebudayaan agar supaya kepala dinas memprioritaskan tenaga pendidik atau guru yang berprofesionalisme guna meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan masyarakat. Uud Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi ayat (1) bagian a. teknis lainnya kementerian pendidikan dan kebudayaan. Pasal (2) Kegiatan pada sebagian program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. program pendidikan anak usia dini, dan pendidikan masyarakat, program menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut; bagi dinas pendidikan dan kebudayaan untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, maka didorong setiap tenaga pendidik atau guru untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikannya dan kebudayaan masyarakat baik dalam bentuk Pendidikan non-formtal dan

kebudayaan masyarakat seperti: pelatihan, kursus, lokal karya.

Jadi dapat dikatakan, peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan masyarakat dapat dilihat dari aspek pendidikan non-formal dan Nilai-nilai kebudayaan bukanlah hanya sekedar dipindahkan dari satu bejana ke bejana yang lain yaitu kegenerasi mudanya, tetapi dalam proses interaksi antara pribadi dengan kebudayaan betapa pribadi merupakan individu yang kreatif bukan pasif. Peran Dinas pendidikan dan kebudayaan yang berkembang atau maju dapatlah dikatakan akan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan masyarakat. Atau dengan perkataan lain bilamana seseorang dapat meningkatkan pendidikan dan kebudayaan, maka ia dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan masyarakat.

Kontribusi peran dinas pendidikan dan kebudayaan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan masyarakat pada aspek pengembangan: pelatihan, kursus, local karya yang secara langsung dapat memberikan penghasilan/pendapatan jika selesai mengikuti pendidikan non-formal dan kebudayaan masyarakat seperti itu. Jika dibandingkan dengan pendidikan formal dari SD sampai Perguruan Tinggi belum tentu sudah selesai memberikan penghasilan.

Dalam kaitan, dengan itu peran dinas pendidikan dan kebudayaan khususnya pemerintah kabupaten lanny jaya, mendorong tenaga pendidik/guru agar supaya masyarakat dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan masyarakat dari setiap individu maupun keluarga.

Tinjauan Pustaka

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana otonomi daerah pada urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Berdasarkan Peraturan Bupati Ianny Jaya Nomor 6 Tahun 2011, Dinas Pendidikan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi: Penyusunan perencanaan program di bidang pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah. Penetapan kebijakan di bidang pendidikan dan Kebudayaan. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi kebijakan, pembiayaan, kurikulum, prasarana dan sarana, pendidik dan tenaga kependidikan dan pengendalian peningkatan kualitas pendidikan masyarakat pendidikan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan. Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada umumnya peran dapat diartikan sesuatu yang menjadi bagian atau pemegang kedudukan yang utama dalam terjadinya sesuatu hal, kegiatan atau peristiwa dalam kehidupan masyarakat berdasarkan norma atau peraturan tertentu.

Menurut Gibson Ivancevich dan Donnelly (2007:479), peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan dua system yang berbeda, biasanya organisasi dan beberapa dari bagian lingkungan. Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Apabila dikaitkan, peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu merupakan aspek dinamis dalam menjalankan tugas, hak, dan kewajiban sesuai dengan kedudukan sebagai bagian atau perangkat dari Pemerintah yang mengurus bidang pendidikan yang aktif dan berpartisipasi dalam memberikan sumbangan yang berguna dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kualitas dan aspek kuantitas. Aspek kualitas menyangkut peningkatan pendidikan dari Sumber Daya manusia tersebut. Kualitas Sumber Daya Manusia ini juga menyangkut dua aspek yaitu, aspek Fisik (kualitas fisik) dan Aspek Non Fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berfikir, dan keterampilan-keterampilan lainnya. Sedangkan aspek kuantitas menyangkut jumlah Sumber Daya Manusia itu sendiri yang mana kurang penting kontribusinya dalam pembangunan dibanding dengan aspek kualitas, karena kuantitas tanpa kualitas Sumber Daya Manusia yang baik akan menjadi beban pembangunan Menurut William B. Werther dan Keith Davis mengatakan bahwa Sumber Daya Manusia adalah orang-orang yang siap memiliki kemampuan dan sanggup untuk menyumbangkan hal-hal yang berguna demi tercapainya suatu tujuan

organisasi, bukan hanya industry atau perusahaan tetapi juga organisasi di bidang politik, pemerintahan, hukum, social, pendidikan, budaya, lingkungan dsb.

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (E.St. Harahap, dkk, 2007: 854). Peran dapat diartikan sebagai prilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berprilaku. Pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berprilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan prilaku peran yang diinginkan berjalan seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur prilaku bawahan.

Kehidupan suatu bangsa erat sekali kaitannya dengan tingkat pendidikan. Pendidikan bukan hanya sekedar mengawetkan budaya dan meneruskannya dari generasi ke generasi, akan tetapi juga diharapkan dapat mengubah dan mengembangkan pengetahuan. Pendidikan bukan hanya menyampaikan keterampilan yang sudah dikenal, tetapi harus dapat meramalkan berbagai jenis keterampilan dan kemahiran yang akan datang, dan sekaligus menemukan cara yang tepat dan cepat supaya dapat dikuasai oleh anak didik.

Pengertian Pendidikan dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai -

nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangnya, istilah pendidikan atau paedagogie berarti bimbingan atau pertolongan yang di berikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi orang dewasa. Selanjutnya pendidikan diartikan sebagai usaha manusia yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar mencapai dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental (Hasbullah, 2008:1).

Menurut Langeveld dalam Hasbullah, Pendidikan ialah: "Setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak yang tertuju kepada anak itu, atau lebih tepat membantu agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa seperti buku, putaran hidup sehari - hari, dan sebagainya dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa" (Langeveld, dalam Hasbullah, 2008:2).

Menurut UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam dunia pendidikan dikenal pula adanya otonomi pendidikan. Menurut Musaheri (2005:125) otonomi pendidikan adalah proses pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan (wewenang) dari pimpinan atau atasan ke tingkat bawahan dalam organisasi. Melalui desentralisasi, segala keputusan yang dibuat dalam tubuh organisasi

didelegasikan kepada tingkatan di bawahannya. Sekolah Sekolah adalah lembaga dengan organisasi yang tersusun rapi dan segala aktifitasnya direncanakan dengan sengaja yang disebut kurikulum. Secara Terminologi, Kata sekolah berasal dari Bahasa Latin: skhole, scola, scolae atau skhola yang memiliki arti: waktu luang atau waktu senggang, dimana ketika itu sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak - anak di tengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang itu adalah mempelajari cara berhitung, cara membaca huruf dan mengenal tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni). Untuk mendampingi dalam kegiatan sekolah anak - anak didampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang psikologi anak, sehingga memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui berbagai pelajaran di atas.

Teori Pendidikan Menurut Snelbecker (dalam Miarso, 2011:103) mengemukakan bahwa teori adalah segala aspek ilmunan tidak semata-mata bersifat empirik, dan yang sangat khusus adalah ringkasan pernyataan yang melukiskan dan menata sejumlah pengamatan empirik.

Budaya atau kebudayaan berasal dari Bahasa Sanskerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (Budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal manusia. Budaya adalah salah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, bahasa merupakan bagian

yang tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu senantiasa dipelajari.

Taylor, (dalam Prasetya, 2011) mengemukakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Moh.Hatta, (dalam Prasetya, 2011) mengemukakan bahwa kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa.

Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, bahasa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu senantiasa dipelajari.

Taylor, (dalam Prasetya, 2011) mengemukakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Moh.Hatta, (dalam Prasetya, 2011) mengemukakan bahwa kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa.

Rujukan: James M. Henslin. Sosilogi: dengan pendekatan membumi, Erlangga, Jakarta.

Metode Penelitian

Metode Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dalam arti mendeskripsikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang tumbuh dan proses yang sedang berkembang. Metode penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subjek /objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dll). Berdasarkan fakta-fakta yang tampil sebagaimana adanya (Nawawiha dan,1983:63) sedangkan bongda dan toylor mendefinisikan Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati (Moleong Lexy, 2003).

Fokus penelitian ini adalah Peran dinas Pendidikan dan kebudayaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan Masyarakat. Sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Oakley (1991:9), yaitu:

1. kontribusi peran dinas pendidikan dan kebudayaan di jabarkan menjadi indikator – indicator:
 - 1) Kontribusi pemikiran
 - 2) Kontribusi dana
 - 3) Kontribusi tenaga
 - 4) Kontribusi sarana dan prasarana
2. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dijabarkan menjadi indikator–indikator:
 - 1) Peran dinas pendidikan dan kebudayaan
 - 2) Aksi kepala sekolah
 - 3) Motivasi tenaga pendidik atau guru
 - 4) Tangunjawab dinas penddidkan dan kebudayaan

Informasi yang akurat dan komprehensif diperoleh penelitian dengan mencari data dari informan. Informasi berkaitan dengan pihak

keempat melalui argument bahwa mereka lebih mengetahui secara spesifik mengenai fenomena yang terjadi di lapangan sesuai dengan focus penelitian. Informan penelitian ini yaitu:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Guru atau Tenaga pengajar
3. Tokoh Agama
4. Tokoh Masyarakat

Hasil Penelitian

1. Penyediaan sarana dan perasana pendidikan dalam Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat
Dinas Pendidikan mengadakan pelatihan - pelatihan yang ditujukan kepada tenaga pendidik demi terciptanya tenaga pendidik yang berkualitas yang nantinya tenaga pendidik mampu menciptakan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang berkualitas pula. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tanpa didukung sarana yang memadai, proses pendidikan tentunya akan mengurangi efektifitas pembelajaran bahkan hal terburuk yang bisa terjadi tanpa dukungan sarana yang tepat maupun memadai proses pendidikan akan tersendat bahkan bisa saja terhenti secara total. Seorang guru yang berkompeten tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang baik tidak akan bisa mentransfer pengetahuan/ pembelajaran secara maksimal.

Adapun program yang telah dijalankan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan sehubungan dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan adalah sebagai berikut: Pembangunan Gedung Sekolah, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, Pengadaan perlengkapan sekolah seperti Pengadaan proyektor dan kelengkapannya. Pengembangan

Kurikulum Secara konvensional terdapat kecenderungan bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat selalu dikaitkan dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta kompetensi guru. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya betul. Ada komponen lain yang jarang disentuh yaitu kurikulum. Argumentasi yang dikemukakan pada tulisan ini adalah kurikulum merupakan instrumen strategis bagi upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Kurikulum sebagai instrumen peningkatan kualitas pendidikan masyarakat terdiri dari tiga entitas yaitu tujuan, metode, dan isi. Peningkatan kompetensi guru dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan hanya akan memberikan makna bagi peserta didik jika diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam kurikulum. Pada konteks Sistem Pendidikan Nasional rumusan tersebut dirumuskan pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Pada Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab Ketentuan Umum SKL didefinisikan sebagai “kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan”. Untuk menjamin agar SKL tersebut dapat dicapai maka kegiatan belajar mengajar tersebut dilengkapi dengan tujuh standar lainnya yaitu standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Keberadaan standar-standar ini telah dijamin oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 2. Kurikulum sebagai bagian dari intervensi peningkatan kualitas

pendidikan masyarakat, tentu tidak bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, SKL menjadi rujukan ketika Kurikulum diterapkan, termasuk tujuh standar nasional pendidikan lainnya.

2. Menyampaikan dan mengembangkan kurikulum

Demikian juga dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tetap menjadi bagian Kurikulum. Satuan pendidikan tetap mempunyai kewenangan untuk mengembangkan kurikulum sendiri yang sesuai dengan kondisi satuan pendidikan tersebut. Adapun program/kebijakan secara garis besar yang telah disiapkan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan sehubungan dengan kurikulum adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, bahan ajar, metode pembelajaran dan sistem penilaian yang berstandar nasional dan internasional.

2. Pengembangan kurikulum pendidikan yang memberikan muatan soft skill untuk peningkatan akhlak dan kepedulian terhadap lingkungan.

Beberapa program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan kebudayaan dalam upaya pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan

2. Pelaksanaan Pengawasan Pendidikan dan kebudayaan

3. Penyusunan Kalender Pendidikan dan kebudayaan Tahun Pelajaran

4. Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreativitas seni dan budaya masyarakat Siswa Lomba Sain

Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional

5. Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba Cerdas Cermat Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional
6. Penyusunan Kurikulum
7. Monitoring dan Evaluasi

Kurikulum merupakan pelajaran dan program pembelajaran yang berasal dari pusat yang kemudian melalui Dinas Pendidikan dan kebudayaan di daerah disampaikan kepada tiap-tiap satuan pendidikan. Bersama dengan pihak – pihak yang berwenang, Dinas Pendidikan dan kebudayaan mengembangkan kurikulum yang ada di satuan pendidikan yang kemudian disebut sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan kebudayaan. Kurikulum nantinya akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman, dan akan terus berkembang searah dengan pertumbuhan dan kebutuhan pendidikan dan kebudayaan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang

Kelemahan dan Kekuatan Internal Dinas Pendidikan dan kebudayaan Dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten lanny jaya 2013-2016, untuk mengidentifikasi masalah Dinas Pendidikan dan kebudayaan menggunakan Metode Analisis Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), and Tantangan (Threats) (SWOT). Metode Analisis SWOT memerlukan adanya masukan berupa Faktor Lingkungan Internal dan Faktor Lingkungan Eksternal. Faktor-faktor ini bersifat subyektif, oleh sebab itu penentuannya harus didasarkan analisis yang tidak memihak dan atas dasar kesepakatan bersama dari anggota

kelompok analisis. Faktor lingkungan internal terdiri dari faktor kekuatan dan faktor kelemahan, sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strengths)

1. Tingginya kesadaran pendidik dan tenaga pendidikan untuk meningkatkan kompetensi.
2. Adanya konsistensi dan kesinambungan upaya peningkatan penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun.
3. Tersedianya anggaran 20 persen dari APBN untuk pembiayaan pendidikan.
4. Tersedianya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mencetak lulusan yang memiliki keterampilan dan siap memasuki pangsa kerja.
5. Tersedianya jaringan teknologi komunikasi dan informasi untuk pengembangan model pendidikan masa depan.

b. Kelemahan (Weakness)

1. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/ pendidikan non formal dan SMA
2. APK SMP belum mencapai 100 persen yang mengakibatkan belum tuntasnya wajib belajar 9 tahun
3. Belum terpenuhinya kualifikasi tenaga pendidik.
4. Kurang meratanya penyaluran tenaga pendidik di lembaga-lembaga sekolah baik kuantitas maupun bidang keahliannya.
5. Belum setiap tenaga pendidik (tutor) Pendidikan Non Formal memiliki kemampuan yang memadai.
6. Belum tersedianya database pendidikan yang komprehensif
7. Belum optimalnya kerjasama antara Dinas Pendidikan dengan dunia usaha dan industri dalam penyerapan tenaga kerja lulusan sekolah kejuruan.
8. Belum meratanya akses internet bagi semua jenjang pendidikan.

9. Belum optimalnya sistem pembinaan karir pendidik dan tenaga kependidikan.
10. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan

Kesimpulan

1. Peran Dinas Pendidikan dan kebudayaan telah menunjukkan perannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Hal tersebut terlihat melalui program – program kegiatan yang telah dilaksanakan seperti peningkatan kualitas tenaga kependidikan yang meliputi pelatihan, penyediaan dana BOSDA, kemudian penyediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan serta penetapan dan pengembangan kurikulum. Kegiatan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat di kabupaten lanny jaya tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat.
2. Adapun faktor pendukung yaitu tingginya kesadaran pendidik dan tenaga kependidikan, adanya konsistensi dan kesinambungan upaya meningkatkan penuntasan wajar diknas, tersedianya anggaran 20 persen dari APBN untuk pembiayaan pendidikan. Sedangkan faktor penghambat dalam melaksanakan perannya yaitu belum terpenuhinya kualifikasi tenaga pendidik, belum setiap tenaga pendidik non formal memiliki kemampuan yang memadai.
3. Salah satu faktor pendukung adalah dana namun dalam kondisi tertentu faktor ini bisa saja menjadi faktor penghambat. Untuk itu perlu

dialokasikan dana tak terduga agar saat terjadi hambatan teknis dan memerlukan dana diluar alokasi yang telah ditentukan akan dapat teratasi sehingga program dapat berjalan dengan lancar. Perlu disiapkan dan dilakukan seleksi yang matang bagi tenaga pendidik baik tenaga pendidik formal maupun tenaga pendidik non formal. Peningkatan kualitas tenaga pendidik yang belum memenuhi standar (S1) dapat dilakukan melalui Universitas Terbuka.

Saran

- a) Perlu dilakukan pembenahan kepada Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga dinas pendidikan dan kebudayaan yang menyiapkan tenaga pendidik untuk mengembangkan dalam peningkatan kualitas pendidikan masyarakat harus lebih di optimalkan dengan mengupayakan berbagai cara untuk berpartisipasi kepada masyarakat pada setiap setiap tempat belajar dan mengajar mengembangkan dalam peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
- b) Agar peran dinas pendidikan dan kebudayaan sebagai penggerak dan mengontrol dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat lebih baik, maka peran dinas pendidikan dan kebudayaan hendaknya mencari alternatif - alternatif yang dapat digunakan sebagai wada atau saluran untuk menyampaikan informasi dari setiap program pendidikan dan kebudayaan kepala dinas harus lagi meningkatkan

intensitas pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan dan kebudayaan dengan tenaga pendidik atau guru

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah. Jakarta: Depdikbud.

Adi, S. (08 Agustus 2014), Pengertian Peningkatan Menurut Ahli. [Http://www.duniapelajar.com/pengertian-peningkatan-menurut-para-ahli](http://www.duniapelajar.com/pengertian-peningkatan-menurut-para-ahli).

DAFTAR PUSTAKA

- E.St Harahap, 2007, 854). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bandung: Balai. Pustaka.
- Hasbullah. 2005. "Dasar-dasar Ilmu Pendidikan" Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamalik, 2009. Dasar – dasar pengembangan kurikulum, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hasbullah, 2006. Otonomi pendidikan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, J. 1996. Metodologi penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong.L.J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prasetya, Joko T, 2011. Ilmu Budaya Dasar. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rujukan: James M. Henslin. 2007 Sosilogi: dengan pendekatan membumi, Jakarta: Erlangga,.
- Supranto, J. 2005. Teknik Pengambilan Keputusan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sagala, Syaiful. 2007. Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Jakarta: Presiden Republik Indonesia).
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur.